

**PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA
WANITA(TKI/TKW) PURNA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI DESA KEDONDONG KECAMATAN KEDONDONG
KABUPATEN PESAWARAN BANDAR LAMPUNG**

Farhana¹ dan Lina Maulidiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Email Correspondence: frh961@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v1i1.234>

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari perspektif pembangunan berbasis masyarakat untuk mengubah knowledge, attitude dan practice. Langkah pertama dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran, antara lain melalui penyuluhan. Pemberdayaan TKI/TKW Purna dan keluarganya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan TKI/TKW Purna dan keluarganya, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul pada TKI/TKW purna berupa menganggur, konsumtif, kehilangan aset, dan kembali bekerja ke luar negeri dapat diatasi.

Kata kunci: pemberdayaan, tenaga kerja, kesejahteraan keluarga

**EMPOWERMENT OF
INDONESIAN WORKERS / WOMEN WORKERS (TKI / TKW)
TO INCREASE FAMILY WELFARE IN KEDONDONG
VILLAGE, KEDONDONG DISTRICT, PESAWARAN
REGENCY, BANDAR LAMPUNG**

Abstract

Community empowerment is an approach from the perspective of community-based development to change knowledge, attitude and practice. The first step in the empowerment process is awareness, including through counseling. Empowerment of retired TKI/TKW and their families is an effort to increase the income of Retired TKI/TKW and their families, so that the problems that often arise for retired TKI/TKW in the form of unemployment, consumptiveness, loss of assets, and returning to work abroad can be overcome.

Keywords: *empowerment, employment, family welfare*

1. Pendahuluan

Bank Dunia melaporkan, pada tahun 2016 ada sekitar 9 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Mereka bekerja baik secara prosedural maupun nonprosedural. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat dan menjadi komponen penting tenaga kerja nasional. Dari jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, lebih dari tiga perempatnya adalah pekerja dengan keterampilan rendah. Sebanyak 32 persen di antaranya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak dan 19 persen bekerja sebagai pekerja pertanian. (Kompas.com)

Berdasarkan BNPTKI bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilihat dari gender, mayoritas perempuan sebanyak 93.641 perempuan dimana persentasi ini jauh lebih banyak daripada laki- laki yang hanya berjumlah 54.644 orang dan dengan latar belakang pendidikan masih didominasi lulusan SD-SMP dengan besaran persentase mencapai 65%. Selebihnya beragam mulai dari tingkat SLTA hingga perguruan tinggi yaitu diploma, sarjana, dan pasca sarjana. (bnp2tki.go.id)

Kebijakan pengiriman TKI/TKW ke luar negeri adalah salah satu mengatasi permasalahan pengangguran, tetapi banyak terjadi masalah-masalah terhadap TKI/TKW dari pengiriman, penempatan dan pemulangan serta pasca pemulangan. Dalam makalah ini dibatasi pada pasca pemulangan TKI/TKW atau disebut dengan TKI/TKW purna. TKI/TKW Purna adalah TKI/TKW yang sudah mengakhiri masa kontrak kerjanya. Permasalahan yang terjadi ketika TKI/TKW pulang dapat berupa pengangguran, konsumtif, kehilangan aset dan dapat kembali bekerja ke luar negeri. Para TKW ini memilih pergi dikarenakan ketidakberdayaan mereka di bidang ekonomi dan ketidakmampuan bekerja di negeri sendiri. Setelah pulang, rata-rata mereka tidak berdaya menghadapi tawaran maupun keinginan konsumtif sehingga mereka menghabiskan uang hasil kerja mereka bertahun-tahun menjadi TKW. Kenyataan tersebut akhirnya menjadikan diri mereka tetap tidak

berdaya dan tidak mandiri secara ekonomi karena setelah uangnya habis, mereka tetap tidak bisa bekerja di negeri sendiri. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan terhadap TKW purna agar tidak kembali lagi bekerja ke luar negeri dan dapat bekerja di negeri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dalam pembangunan berbasis masyarakat dengan pengembangan *capacity building* sebagai bagian yang penting di dalamnya, sehingga pemberdayaan sebagai tujuan semua bentuk pengembangan masyarakat. (Ife dan Tesoriero, 2014: 510). Proses pemberdayaan masyarakat melalui tahapan penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan (Randy dan Rian, 2007: 2- 7). Penyadaran sebagai upaya pemberian kesadaran masyarakat yang hendak diberdayakan. Tahap kedua, atau pengkapasitasan atau disebut *capacity building* dimaksudkan agar ketika diberikan daya atau kuasa mereka telah memiliki kemampuan. Tahap ketiga, pendayaan atau diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang sesuai kecakapan yang dimiliki (*empowerment*). (Randy dan Rian, 2007, 2-7)

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangkameningkatkan kesejahteraan TKI/TKW melalui pengembangan usaha ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas TKI/TKW purna dan keluarganya untuk mengakses program edukasi keuangan, dan program edukasi kewirausahaan. Ini merupakan upaya agar TKI/TKW tidak kembali bekerja di luar negeri dan mendorong pengelolaan remitansi yang lebih produktif.

Provinsi Lampung termasuk lima besar provinsi yang terbanyak mengirim TKI ke luar negeri di seluruh Indonesia yaitu pertama Jawa Barat, kedua Jawa Tengah ke tiga, Jawa Timur, ke empat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung, lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Provinsi tahun 2016:

No	Provinsi	Jumlah/ribu
1	Jawa Barat	51.047
2	Jawa Tengah	49.512
3	Jawa Timur	43.135
4	Nusa Tenggara Barat	40.415
5	Lampung	16.049

Sumber: <http://www.bnp2tki.go.id>

Jenis pekerjaan yang terbanyak TKI asal Lampung adalah bekerja sebagai *domestic worker* 31.956 dan *caregiver* 6.504 serta *worker* 2.704. Pekerja disektor informal (10.292) lebih banyak dua kali dari pada sektor formal 5.757. Penempatan TKI asal Provinsi Lampung terbanyak dikirim ke Taiwan sebanyak 9.283, Malaysia 3.611, Singapura 1.564, Hongkong 798, dan Saudi Arabia sebanyak 186. Adapun penempatan TKI asal Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2016 bahwa SMP yang paling besar (8.007), SMA (5.419), SD (2.508), Diploma sebanyak 79, sarjana sebanyak 35 dan Pasca sarjana satu orang. (<http://www.bnp2tki.go.id>)

Jumlah pengaduan dari provinsi Lampung tiga tahun terakhir meningkat yaitu tahun 2014 sebanyak 199, tahun 2015 sebanyak 207 dan tahun 2016 sebanyak 766, sehingga Provinsi Lampung diurutan ke enam dari 33 provinsi se Indonesia dan 3 tahun terakhir (2014-2016) pengaduan meningkat yaitu 2014 sebanyak 103 pengaduan, 2015 sebanyak 199 pengaduan dan 2016 sebanyak 207 pengaduan. Tahun 2016 ada 12 jenis masalah diadukan dari 21 jenis masalah diadukan adalah sebagai berikut PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir sebanyak 705 pengaduan, Gaji tidak dibayar 472 pengaduan, TKI ingin dipulangkan 357 pengaduan, sakit sebanyak 312 pengaduan, putus hubungan komunikasi sebanyak 246, overstay sebanyak 213, pekerjaan

tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebanyak 182, TKI gagal berangkat sebanyak 143, TKI tidak berdokumen sebanyak 133, tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai sebanyak 121, potongan gaji melebihi ketentuan sebanyak 109, ilegal rekrut calon TKI sebanyak 100 pengaduan. (<http://www.bnp2tki.go.id>)

Salah satu kabupaten yang terbesar dalam jumlah penempatan TKI adalah berasal dari Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran termasuk lima besar kabupaten yang jumlah penempatan TKI terbesar di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif untuk TKI Purna maka dapat meningkatkan kesejahteraan TKI Purna dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan upaya menanggulangi permasalahan pasca penempatan berupa menganggur, konsumtif, kehilangan aset, dan kembali bekerja ke luar negeri. Langkah pertama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diperlukan penyadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi berupa hak untuk mempunyai sesuatu dimana proses tersebut dimulai dari dalam diri mereka sendiri dan juga ada program-program pelaksanaan pemberdayaan TKI/TKW yang dapat dilakukan di desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung.

A. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Kedondong tentang hak dan kewajiban TKI/TKW;
2. Memberikan motivasi untuk berwirausaha;
3. Memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan program edukasi kewirausahaan.

B. Manfaat Kegiatan

1. Meningkatkan kesadaran hukum di bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Kedondong kabupaten Pesawaran Lampung;
2. Meningkatkan motivasi kepada TKI/TKW purna desa Kedondong untuk berwirausaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
3. Mendorong untuk mengasah keterampilan sesuai keahlian masing-masing.

C. Sejarah Singkat Kabupaten Pasewaran

Kabupaten Pesawaran termasuk kabupaten Daerah Otonomi baru yang merupakan daerah pemekaran kabupaten Lampung Selatan.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang kabupaten Pesawaran ditetapkan menjadi kabupaten. Pada tahun 1968, dimulai dengan usulan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah diakui keberadaannya pada tahun 1997,
2. Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan
3. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan.

Dalam semangat reformasi dan desentralisasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan maka Kabupaten Pesawaran melalui proses yuridis formal dengan Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 021/P3KP/PPK/IV/2001, akhirnya terbentuklah Kabupaten Pesawaran melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, dengan hari jadi dengan ditandai peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal 2 November 2007.

Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh kecamatan), yakni Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan,

Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, dan pada tahun 2012 dimekarkan kembali dengan penambahan kecamatan Marga Punduh pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way Khilau pemekaran Kecamatan Kedondong.

D. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,92o - 105,34o' Bujur Timur, dan 5,12o - 5,84o Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Kedondong

E. Kondisi Administratif

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam tujuh kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng. Kecamatan Padang Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas 31.763 (BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013).

Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil. Tiga pulau terbesar adalah pulau Legundi, pulau Pahawang dan pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.

F. Penduduk

Data sensus penduduk Tahun 2010, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk 398.848 jiwa, Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa di pesawaran terdapat 206.223 jiwa penduduk laki-laki dan 192.625 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah

1. kecamatan Padang Cermin sebanyak 88.795 jiwa (22,26 %),
2. kecamatan gedong tataan sebanyak 86,059 jiwa (21,58 %),
3. kecamatan Negeri katon sebanyak 61.158 jiwa (15,33 %),
4. kecamatan kedondong sebanyak 57.698 jiwa (14,47 %),
5. kecamatan Tegineneng sebanyak 49.753 jiwa (12,47 %),
6. kecamatan Way Lima sebanyak 29.442 jiwa (7,38 %),
7. kecamatan punduh pidada sebanyak 25,943 jiwa (6,50 %).

2. Metode Pelaksanaan

A. Metode Pelaksana

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung meningkatkan pemahaman perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan penyuluhan.

Metode penyuluhan yang dirancang pada kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dan penguasaan ataupun pemahaman terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyuluhan diberikan dalam bentuk:

1. Teori 25 %
2. Diskusi 50 %
3. Evaluasi dan simulasi 25 %

B. Tempat Pelaksanaan

Kantor desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung.

C. Peserta

Peserta kegiatan ini dititik beratkan pada TKI/TKW purna dan masyarakat sebagai penduduk desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sebanyak 35 orang.

Kriteria peserta penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung yang berdomisili di desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung;
2. Pernah menjadi TKI/TKW;
3. Tidak dibatasi jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan.

D. Materi Penyuluhan

Materi yang diberikan dalam penyuluhan di desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap TKI/TKW di Indonesia;
2. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan TKI/TKW Purna;
3. Motivasi berwirausaha.

3. Hasil Kegiatan

Penyuluhan Pemberdayaan TKI/TKW Purna ini dihadiri oleh peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari TKI/TKW purna dan masyarakat umum.

Selama Penyuluhan berlangsung, terlihat respon peserta cukup tinggi. Respon peserta yang mengikuti penyuluhan dilihat dari kehadiran peserta sesuai dengan undangan bahkan melebihi karena ada

mahasiswa yang KKN menghadiri penyuluhan ini, dan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta, hal ini disebabkan materi yang disajikan dirasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping itu peserta menyampaikan permasalahan yang dialami dan harapan serta keinginan peserta untuk ada tindak lanjut.

4. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam rangka penanggulangan permasalahan yang dialami oleh TKI/TKW purna berupa menganggur, konsumtif, kehilangan aset, dan kembali bekerja ke luar negeri maka perlu adanya program pemberdayaan masyarakat khususnya TKI/TKW purna.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pengembangan masyarakat yang berupaya mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam hal ini TKI/TKW Purna. Ini memperlihatkan pentingnya pengembangan kapasitas TKI/TKW Purna sebagai upaya meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Oleh karena itu langkah pertama diadakan peningkatan pengetahuan dan sikap yang berbentuk penyuluhan tentang kebijakan pemerintah melalui program pemerintah dalam rangka upaya yang dapat dilakukan TKI/TKW Purna dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan di Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung merupakan salah satu kontribusi tenaga pendidik agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman TKI/TKW Purna terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya TKI/TKW Purna

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak terutama kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

- BNP2TKI, Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiatenaga Kerja Indonesia
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Randy R. Wrihatnolo dan Rian Nugroho Dwidjowijoyo, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/28/123000326/32-persen-pekerja-migran-indonesia-adalah-pembantu-rumah-tangga>.
- <http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI>
- http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf